

JURNAL

MEDIA HUKUM

TERAKREDITASI:

No. 26/DIKTI/Kep/2005
No. 43/DIKTI/Kep/2008
No. 81/DIKTI/Kep/2011
No. 1130/E5.2/TU/2016

JURNAL MEDIA HUKUM (JMh) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. JMh memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu Hukum dan Syari'ah serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Redaksi JMh menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi JMh. Naskah yang dikirim terdiri dari 20-25 halaman kuarto (A4) untuk artikel hasil penelitian empirik atau 15-20 halaman kuarto (A4) untuk artikel hasil kajian teoritis, dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dari luar UMY dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PENANGGUNG JAWAB

Tisno Rahardjo

KETUA PENYUNTING

Mukti Fajar ND

PENYUNTING PELAKSANA

Yeni Widowaty
Danang Wahyu Muhammad
Sunarno
Nanik Prasetyoningsih

STAF PELAKSANA

Soeprijadi
Herlin Aniko

ALAMAT REDAKSI

RUANG JURNAL
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul,
DI Yogyakarta.
Telp. 0274-387656 psw: 220 Fax. 0274 -387646
email: jurnalmediahukum@gmail.com
OJS: <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh>

Daftar Isi

- H. 124 *Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional*
Jawahir Thontowi; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- H. 137 *Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh*
Adwani; Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- H. 150 *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*
Isis Ikhwansyah, An-an Chandrawulan, Prita Amalia; Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- H. 162 *Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi*
Indriati Amarini; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- H. 171 *Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang)*
Nuriyani T. Ballu; Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
- H. 181 *Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum*
Bagus Samawa; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 190 *Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*
Fatkhurohman, Miftachus Sjuhad; Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
- H. 202 *Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah*
Septi Nur Wijayanti, Tanto Lailam; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 217 *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*
Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala; Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
- H. 228 *Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor*
Leli Joko Suryono, Reni Anggriani; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang penyuntingan, akhirnya Jurnal Media Hukum (JMh) Volume 25 Nomor 2 Desember 2018 ini dapat diterbitkan. Sebagai suatu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMh berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas terbitan yang selaras dengan "Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah" Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMh menyajikan 10 Artikel terpilih yang dikirim oleh Penulis dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.

Tulisan pertama pada terbitan ini disajikan artikel dari *Jawahir Thontowi* dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada halaman 124. Tulisan dengan judul *Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional*, mengkaji mengenai pengaruh konflik Laut Tiongkok Selatan dan kejahatan lintas negara terhadap perdamaian dan keamanan negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap ketahanan nasional Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan secara normatif ini merujuk bahan hukum primer terdiri dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan non hukum lainnya. Temuan penelitian ini adalah: (1) Konflik laut Tiongkok Selatan sebagai akibat dari kebijakan penentuan *the nine dashed lines* tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. (2) Konflik laut Tiongkok Selatan dipandang telah mengancam perdamaian di negara-negara ASEAN dan juga ketahanan nasional Indonesia.

Pada halaman 137, ditempatkan tulisan dari *Adwani*, dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh. Penulis ini mengajukan artikel dengan judul *Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Illegal di Perairan Provinsi Aceh*. Diskusi dalam artikel ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh. Penelitian yang

dilakukan dengan studi kepustakaan yang mempelajari dokumen serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pencegahan penangkapan ikan secara illegal dengan berbagai kebijakan daerah dan melakukan pengawasan secara berkala bersama TNI AL, Dinas Kelautan, dan Panglima Laut. Namun masih ada persoalan kebijakan dengan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan asing, karena Peraturan yang ada saat ini hanya dapat menjangkau nelayan lokal.

Tulisan selanjutnya dari *Isis Ikhwanisyah, An-an Chandrawulan dan Prita Amalia*, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Tim penulis ini mengirimkan artikel dengan judul: *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Artikel ini menganalisis dukungan regulasi hukum nasional dalam memberikan peluang bisnis bagi BUMN pada era keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum nasional belum memberikan secara optimal peran BUMN dalam era MEA. Hal ini karena pengaturan terkait modal pada BUMN yang berasal dari APBN merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menempatkan status modal BUMN adalah bagian dari keuangan negara sehingga menimbulkan banyak hambatan bisnis.

Selanjutnya, *Indriati Amarini*, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Menulis artikel dengan judul *Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi*. Artikel yang diletakkan pada halaman 162 menyampaikan diskusi tentang *Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi*. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengadilan administrasi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbuatan pejabat pemerintah, harus mampu mewujudkan keadilan yang menjadi esensi dari tujuan dari hukum administrasi yaitu keadilan sosial.

Pada halaman 171 bisa dibaca tulisan dari **Nuriyani T. Ballu**, dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Artikel dengan judul *Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang)*. Jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian normative yang mengkaji putusan pengadilan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas I Kupang. Disukusi yang diajukan mengenai kedudukan dan penerapan pidana denda sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Temuan penelitian ini: (1) Kedudukan pidana denda dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Belum memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sebab sekalipun telah diputuskan pengadilan tetapi belum memberikan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerapkannya; (2) Di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, penerapan peraturan pidana denda menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sekalipun sudah ada takaran atau ukurannya namun belum seimbang dengan nilai jual barang dan jasa ada. Hal ini karena antara jaksa dan hakim belum menilai suatu perkara tindak pidana tidak saja dinilai dari nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara melainkan bagaimana caranya terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Bagus Sarnawa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengirimkan tulisan yang berjudul *Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum* yang ditempatkan pada halaman 181 Penulis mencoba memaparkan bahwa ASN harus netral, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kajian ini fokus pada pergeseran aturan netralitas ASN di Indonesia dalam pemilihan umum. Temuan penelitian ini menunjukkan Pada masa Orde Lama, ASN dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Pada masa Orde Baru, ASN, diartikan sebagai kesatuan korps, sebagai

upaya menyatukan kembali ASN yang terkotak-kotak dalam afiliasi partai politik, Pada masa Orde Reformasi, ASN tidak saja larangan untuk menjadi anggota partai politik namun juga terbebasnya ASN dari intervensi politik, sehingga ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Selanjutnya, **Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad**, dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, mengajukan isu mengenai *Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, yang diletakkan di halaman 190 Artikel ini adalah penelitian empiris yang mengkaji tentang sejauh mana daya ikat dan tindak lanjut hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat terhadap perubahan substansi rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan jaring aspirasi masyarakat menghasilkan: (1) Segala masukan dari pemangku kepentingan tidak selalu dipenuhi, apalagi yang bertentangan dengan keinginan (politik hukum) oleh pihak legislator. (2) Hal-hal yang pasti dipenuhi oleh pihak legislator kalau menyangkut tentang kebijakan baru, informasi peraturan perundangan baru, informasi prosedur teknis baru.

Penulis berikutnya adalah **Septi Nur Wijayanti, Tanto Lailam** dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan tulisan dengan judul *Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah* pada halaman 202. Kajian ini dilakukan secara yuridis normative dengan memfokuskan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan analisis terhadap Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007, Putusan MK No.12/PUU-V/2007, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, Putusan MK No.85/PUU-XI/2013 menunjukkan bahwa dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan tolok ukur *maqashid syariah* dalam kerangka bernegara Pancasila yang sejalan dengan idealisasi *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*

Pada halaman 217 disajikan artikel yang berjudul *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*

Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam yang ditulis oleh Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Tulisan ini mencoba membahas konsep pengawasan izin lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di dalam UUPPLH. Penelitian ini dilakukan dengan kajian normatif atau doktrinal yang memfokuskan kajian terhadap izin lingkungan sebagai instrumen hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengawasan tidak ditemukan dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum sebagaimana konsep Izin Lingkungan. Sebagaimana amanat yang terkandung dalam Asas Kejelasan Rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mencegah timbulnya multitafsir dalam pemaknaan maupun implementasi materi muatan dalam sebuah undang-undang.

Artikel terakhir edisi ini mencantumkan tulisan mengenai *Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor*. Tulisan dalam halaman 228 ini adalah karya dari **Leli Joko Suryono**, **Reni Anggriani**, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusi ini berangkat dari pemahaman yang dimaksud dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor, serta menpersoalkan kedudukan hukum Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Penelitian yang dilakukan secara normative dengan studi pustaka tersebut menghasilkan temuan : (1) Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan melalui kerjasama dengan pihak lain dengan penggunaan sarana teknologi informasi sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2014 ; (2) Kedudukan hukum pihak ketiga dalam layanan Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah sebagai penghubung bank dengan nasabah (agen) dan perpanjangan tangan pihak bank (mitra).

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan baik. Berikut juga kami ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta

Tim Divisi Publikasi LP3M UMY yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, Desember 2018

Ketua Penyunting

Mukti Fajar ND